

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Politik internasional merupakan tempat yang penuh akan kepentingan dari banyak negara dalam menggapai *national interest* mereka. Negara harus membuktikan kedaulatannya dalam konstelasi politik global, agar posisi mereka dapat dipertimbangkan dalam berbagai aspek struktur internasional seperti organisasi internasional. Kedaulatan menjadi modal penting bagi suatu negara untuk terlibat dalam berbagai kepentingan internasional, terutama untuk mencapai kepentingan nasional melalui upaya-upaya yang diplomatis. Thomson J. E. dalam jurnal *State Sovereignty in International Relations: Bridging the Gap between Theory and Empirical Research* menyatakan bahwa kedaulatan adalah adanya otoritas meta-politik sebagai penggerak pemerintahan dan wewenang yang dimiliki dalam hal politik, ekonomi, sosial, budaya, atau keilmuan bagi negara sendiri¹; dirangkum oleh Thomson kedaulatan juga memiliki persyaratan yang terdiri dari, pengakuan negara lain, pemerintahan, politik domestik (birokrasi), kekuatan koersif (aparatus keamanan), dan wilayah².

Taiwan menjadi salah satu negara kecil di Asia Timur yang memiliki konflik dengan Tiongkok dikarenakan adanya unsur keterikatan, secara sejarah kedua negara tersebut pernah mengalami sengketa wilayah dan kekuasaan serta kedaulatan mereka sebagai suatu identitas negara di perpolitikan internasional.

¹ Thomson, J. E. "State Sovereignty in International Relations: Bridging the Gap between Theory and Empirical Research". *International Studies Quarterly*. Vol. 39. No. 2. 1995. Hlm. 213-233.

² *Ibid.* Hlm. 219-227.

Sebelumnya identitas Tiongkok terlebih dahulu dipimpin oleh Dinasti Qing yang masih bersifat monarki hingga tahun 1912; kemudian muncullah figur revolusioner Dr. Sun Yat-sen di tengah *chaos*-nya kondisi politik dan perekonomian pada saat itu dengan membawa gagasan “Demokrasi” bagi Tiongkok³. Tidak berlangsung lama Dr. Sun Yat-sen meninggal dan kemudian gagasannya dilanjutkan oleh Jenderal Chiang Kai-shek, yang secara bersamaan paham komunisme mulai muncul sebagai pihak oposisi pada saat itu⁴. Singkatnya gagasan demokrasi diwujudkan melalui berdirinya partai KMT (*Kuomintang*), sedangkan pihak komunis mendirikan CCP (*Chinese Communist Party*) di bawah kepemimpinan Mao Tse-tung (Mao Zedong)⁵. Dalam perjalanannya partai komunis semakin mendapat perhatian dari publik dan titik balik tersebut dimulai pasca pendudukan Jepang.

Sengketa terjadi sekitar tahun 1930an, akibat terdapat identitas ganda yakni PRC (*People’s Republic of China*) dan ROC (*Republic of China*) yang muncul dari adanya pendudukan Jepang terhadap Tiongkok dan adanya dualisme perjanjian; Perjanjian Damai San Francisco yang terdiri dari perjanjian damai dengan ROC (Taiwan) pada tahun 1952 dan perjanjian damai dan persahabatan dengan PRC (Tiongkok) pada tahun 1978⁶. Terbentuknya PRC pada tahun 1949, memunculkan klaim bahwa kedaulatan Taiwan merupakan milik pemerintahan

³ CRF-USA. “*The Chinese Civil War : Why Did the Communists Win?*”. Bill of Rights in Action. Vol. 29. No. 4. 2014. Hlm. 1.

⁴ Cucchisi, L. J. “*The Causes and Effects of the Chinese Civil War, 1927-1949 [Thesis]*”. Seton Hall University Dissertations and Theses (ETDs). 2002. Hlm. 1.

⁵ *Ibid.* Hlm. 1-2.

⁶ Chiang, Y. F. “*One-China Policy and Taiwan*”. Fordham International Law Journal. Vol. 28. No. 1. 2004. Hlm. 39.

PRC yang telah ditempati pemerintah ROC sejak tahun 1945⁷. Dalam konstelasi politik internasional, Taiwan juga kalah lantaran pendapat mengenai *historical ownership*, *abrogation of the Treaty of Shimonoseki*, dan *the Cairo Declaration* dianggap tidak valid dalam hukum internasional⁸. Namun Taiwan dapat disebut sebagai negara, melalui sudut pandang *de facto* atau secara *status quo* dengan kekuatan revisionis⁹.

Bayang-bayang Tiongkok terhadap Taiwan melalui ‘*One-China Policy*’ atau ‘*One-China Principle*’ menjadi tekanan tersendiri bagi pemerintahan Taiwan sejak lama; yakni bagaimana upaya Tiongkok (*mainland*) untuk melakukan reunifikasi yang tentu tidak sejalan dengan Taiwan. Mengingat Tiongkok memiliki wilayah yang luas dan sumber daya manusia yang berlimpah dengan kapabilitas militer yang tentu melebihi Taiwan, maka konfrontasi secara langsung akan merugikan Taiwan serta sangat beresiko. Dalam Jurnal *Explaining Taiwan’s Revisionist Diplomacy* dikutip dari *China Post* tercatat pada tahun 2004 hampir 800 rudal balistik M-9 dan M-11 jarak pendek Tiongkok dikerahkan di provinsi Fujian serta pesawat militer Su-27 dan Su-30 yang dibeli dari Rusia, yang tentu dapat menimbulkan dampak serius bagi warga sipil dan militer Taiwan¹⁰. Upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah sebelumnya, Presiden Lee Teng-hui (1988-2000) dan Chen Shui-bian (2000-2008) penanaman nasionalisme dengan

⁷ *Ibid.* Hlm. 41. Pemerintah PRC mengatakan, “after replacing the government of the Republic of China in 1949, the government of the P.R.C. has become the sole legal government of China, enjoying and exercising sovereignty over the whole of China, including Taiwan.” (2000 White Paper)

⁸ *Ibid.*

⁹ Ross, R. S. “*Explaining Taiwan’s Revisionist Diplomacy*”. *Journal of Contemporary China*. Vol. 15. No. 48. 2006. Hlm. 443–458. – Kekuatan Revisionis (*Revisionist Power*), merupakan gerakan independen sebagai bentuk perlawanan terhadap ‘*One-China Principle*’ dan sebagai bentuk ketidaksetujuan atas reunifikasi.

¹⁰ *Ibid.* Hlm. 445.

penempatan beberapa tingkatan resiko yang mengancam keamanan nasional. Di sisi lain Ma Ying-jeou (2008-2016) menjalin dan mempromosikan kerjasama ekonomi serta menghindari provokasi Tiongkok. Kemudian Tsai Ing-wen (2016-sekarang) menghindari provokasi Tiongkok dan mempertahankan *status quo*¹¹.

Saat kampanye pemilihan presiden di Taiwan, Tsai Ing-wen mengemukakan bahwa kebijakan yang diambil untuk menghadapi Tiongkok adalah dengan “mempertahankan *status quo*”. Dengan keputusan tersebut Tsai Ing-wen secara tidak langsung memposisikan diri sesuai keinginan masyarakat Taiwan untuk tidak terlalu mengupayakan kedaulatan (lepas dari Tiongkok sepenuhnya) karena dinilai beresiko namun tetap menolak ajakan dari Tiongkok untuk reunifikasi¹². Hal ini juga demi menjaga stabilitas hubungan *cross-strait* antara Taiwan dengan Tiongkok yang masing-masing dari mereka juga masih memiliki kepentingan kerjasama ekonomi non-diplomatik untuk memenuhi kebutuhan melalui ekspor-impor.

Tsai Ing-wen juga merupakan presiden terpilih dari partai DPP (*Democratic Progressive Party*) yang berani menyatakan bahwa Taiwan merupakan negara yang merdeka tanpa perlu untuk mendeklarasikan diri¹³. Hal tersebut juga didukung lantaran DPP dinilai lebih ‘nasionalis’ karena cukup berani dalam mengambil keputusan mengenai urusan lintas selat dengan Tiongkok,

¹¹ Bush & Hash. “*Taiwan’s Democracy and the China Challenge*”. The Brookings Institution. 2019. Hlm. 2.

¹² Glaser, B. S. “*Prospects for Cross-Strait relations as Tsai Ing-wen assumes the presidency in Taiwan*”. Center for Strategic & International Studies. 2016. Hlm. 2.

¹³ Sudworth, John. “*China Needs to Show Taiwan Respect, Says President*”. Diakses dari <https://www.bbc.com/news/world-asia-51104246>. Pada tanggal 03 Januari 2021.

berkebalikan dengan partai KMT (*Kuomintang*)¹⁴. Pada masa pemerintahannya, Taiwan dinilai memiliki peluang terbuka untuk menjalin hubungan lebih erat dengan Amerika Serikat meskipun bersifat non-diplomatik. Ditandai dengan masuknya Taiwan dalam program *U.S. Visa Waiver Program* dan inovasi program *New Southbound Policy* dengan mengedepankan pengembangan bakat, kerjasama ekonomi dan perdagangan, hubungan regional, serta *resource sharing*¹⁵.

Sedikit banyak Amerika Serikat juga memiliki peran dalam konflik Tiongkok-Taiwan, dalam sejarah pencabutan keanggotaan Taiwan dari PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa). Hubungan Amerika Serikat dapat dinilai dinamis dan oportunistis dalam permasalahan tersebut, mengingat Amerika Serikat juga menjadi anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Tercatat Amerika Serikat sebelumnya sempat mengakui keberadaan ROC (Taiwan) hingga tahun 1977 dan pada tahun 1978 menggeser pengakuan kedaulatan ke PRC (Tiongkok)¹⁶, namun Amerika Serikat tetap menjaga hubungan baik dengan Taiwan. Dinamisnya respon Amerika Serikat terhadap konflik kedaulatan Taiwan-Tiongkok dapat dilihat dari berubah-ubahnya tanggapan setiap presiden pada kebijakan *One-China Principle*¹⁷. Sehingga Amerika Serikat dari dulu hingga sekarang menjadi posisi penyeimbang hubungan lintas selat antara Taiwan dengan Tiongkok;

¹⁴ Templeman, K. *Politics in the Tsai Ing-wen Era. Taiwan: The Development of an Asian Tiger*. (Boulder: Lynne Rienner Publishers, 2020). Hlm. 70-72.

¹⁵ Taiwan Government. “*Foreign Affairs*”. Diakses dari https://www.taiwan.gov.tw/content_5.php. Pada tanggal 01 Oktober 2020.

¹⁶ Bush & Hash. *Op. Cit.* Hlm. 4

¹⁷ Kan, A. S. “*China/Taiwan: Evolution of the “One China” Policy – Key Statements from Washington, Beijing, and Taipei*”. Congressional Research Service. 2007. Hlm. 1-84.

dengan arah kebijakan yang menyesuaikan presiden yang sedang menjabat pada saat itu.

Peneliti menggunakan beberapa tinjauan pustaka untuk mendapatkan konsensus dan *research gap* dengan harapan nantinya peneliti dapat lebih berkontribusi dalam penelitian dengan lingkup yang sama. Dalam jurnal karangan Bueger & Wivel (2018)¹⁸ dan Ross, R. S. (2006)¹⁹ menjelaskan tentang konsep negara kecil dengan kekuatan yang kecil dalam kancah perpolitikan internasional sehingga perlu adanya upaya untuk menonjolkan kapabilitas negara tersebut. Sedangkan untuk jurnal karangan Rich T. S. (2009)²⁰, Hsieh, P. L. (2017)²¹, dan Shattuck, T. J. (2020)²², menjelaskan tentang konsep *diplomatic recognition* sebagai upaya Taiwan dalam mencari pengakuan negara lain atas kedaulatan mereka serta berfokus pada *diplomatic checkbook*. Maka kemudian peneliti akan mengambil *small states dilomacy* dan *diplomatic recognition* dalam membedah alur penelitian ini. Penelitian ini akan memiliki perbedaan pada fokus penelitiannya, yang nantinya akan berfokus pada pemerintahan Tsai Ing-wen dengan sudut pandang dari Taiwan.

¹⁸ Bueger & Wivel. "How do small island states maximize influence? Creole diplomacy and the smart state foreign policy of the Seychelles". Journal of Indian Ocean Region. 2018. Hlm. 1-19.

¹⁹ Ross, R. S. "Explaining Taiwan's Revisionist Diplomacy". Journal of Contemporary China. Vol. 15. No. 48. 2006. Hlm. 443-458.

²⁰ Rich, T. S. "Status for Sale : Taiwan and the Competition for Diplomatic Recognition". Issues & Studies[©] 45. No. 4. 2009. Hlm. 159-188.

²¹ Hsieh, P. L. "The quest for recognition: Taiwan's military and trade agreements with Singapore under the one-China policy". International Relations of the Asia-Pacific. Vol. 0. 2017. Hlm. 1-27.

²² Shattuck, T. J. "The Race to Zero?: China's Poaching of Taiwan's Diplomatic Allies". Foreign Policy Research Institute by Elsevier Ltd, ORBIS 1049. Vol. 64. No. 2. 2020. Hlm. 334-352.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut telah dijelaskan secara singkat mengenai diplomasi yang dilakukan Taiwan dalam menjaga kedaulatan di perpolitikan global, khususnya bagaimana Taiwan menjalin hubungan non-diplomatik dengan Amerika Serikat dan negara-negara Asia Tenggara. Sehingga dalam penelitian ini rumusan masalah yang ingin diajukan adalah **“Bagaimana upaya Taiwan dalam menjaga kedaulatan di masa pemerintahan Tsai Ing-Wen terhadap *One-China Principle* tahun 2016-2020 ?”** Rumusan masalah yang diajukan tentu memiliki beberapa justifikasi tersendiri. Pertama, Taiwan merupakan negara yang tidak diakui secara *de jure* dikarenakan sejarah dan konstelasi politik dengan Tiongkok (*mainland*) pada tahun 1949, namun Taiwan tetap menyatakan sebagai negara yang berdaulat²³. Pemerintahan Tsai Ing-wen menjadi menarik dibahas dikarenakan dirinya merupakan presiden perempuan pertama di Taiwan dan berasal dari DPP yang terkenal cukup vokal dalam menyampaikan kedaulatan Taiwan. Cukup aktifnya Taiwan dalam pemerintahan Tsai Ing-wen menyatakan kedaulatan mereka, meskipun mereka merupakan negara yang kecil jika dibandingkan dengan Tiongkok.

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Secara Umum

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan demi memperoleh gelar Sarjana Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

²³ Chiang, Y. F. “*One-China Policy and Taiwan*”. Fordham International Law Journal. Vol. 28. No. 1. 2004. Hlm. 1-87.

1.3.2 Secara Khusus

Penelitian ini akan berusaha menjelaskan tentang bagaimana upaya Taiwan dalam melakukan diplomasi terhadap negara-negara lain demi mempertahankan kedaulatan sebagai negara *de facto* dan terbebas dari bayang-bayang Tiongkok atas kebijakan ‘*One-China Principle*’ serta dengan mempertimbangkan bagaimana kontribusi Taiwan dalam bidang perekonomian global khususnya perdagangan dan FDI (*Foreign Direct Investment*) atau ODI (*Outward Direct Investment*) di masa pemerintahan Tsai Ing-wen 2016-2020. Mengingat Taiwan merupakan negara yang tidak diakui secara *de jure* tentu akan menjadi sangat beresiko bagi negara-negara lain dalam menjalin hubungan diplomatik dengan Taiwan. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa Taiwan tetap dapat menjalin hubungan kerjasama non-diplomatik dengan negara-negara lain dengan tujuan utama sebagai bentuk ‘*seeking attention*’ di lingkup internasional. Manfaat yang dapat diperoleh melalui penelitian ini adalah dapat menambah pengetahuan baru bagi akademisi maupun praktisi, khususnya mengenai diplomasi yang dilakukan oleh Taiwan; dengan sudut pandang Taiwan sebagai identitas yang berbeda dari Tiongkok dan bagaimana Taiwan mengakui dirinya sebagai negara yang berdaulat.

1.4 Kerangka Pemikiran

1.4.1 Landasan Teori dan Konseptual

1.4.1.1 *Small States Diplomacy*

Diplomasi merupakan upaya negara dalam mencapai kepentingan nasionalnya di ranah internasional melalui proses negosiasi dan komunikasi antara

perwakilan negara (kepala negara, diplomat, atau perwakilan negara yang diakui) yang merupakan perwujudan dari kebijakan luar negeri²⁴. Diplomasi sangat tidak bisa dipisahkan dari unsur politik, sehingga ketika diplomasi memasuki konsep politik tentu akan memberikan pengertian baru dan konsep yang berbeda dari sebelumnya²⁵. Menurut Payne (2004), umumnya *small states* ditindaklanjuti oleh negara yang memiliki kuasa dan institusi yang lebih kuat, jauh lebih rentan dibandingkan memiliki peluang, hal tersebut merupakan konsekuensi kecil dari politik global²⁶. Makna dari *small states diplomacy* sendiri merupakan upaya non-koersif dengan mengedepankan hubungan-hubungan diplomatik yang dilakukan oleh negara-negara kecil untuk dapat bertahan dan mendapatkan kesejahteraan dalam sistem politik internasional yang sangat rentan bagi mereka²⁷.

Negara dapat dikategorikan sebagai *small states* dengan beberapa standar yang di antaranya adalah luas wilayah, populasi, PDB (Pendapatan Domestik Bruto), pengeluaran militer, perdagangan eksternal, sumber daya diplomatik; yang menurut Jalan (1982), untuk mengidentifikasi *small states* yakni dengan melihat jumlah penduduk hingga lima juta, luas wilayah kurang dari 65.000 km² dan PDB

²⁴ Berridge G. R. *Diplomacy : Theory and Practice*. Edisi keempat. (New York : Palgrave Macmillan, 2010). Hlm. 1-3.

²⁵ Misalnya saja beberapa turunan dari diplomasi yakni; (1) *Gastrodiplomacy*, merupakan diplomasi untuk menekankan identitas negara melalui makanan (Suntikul, 2017), (2) *Cultural Diplomacy*, penekanan nilai-nilai budaya sebagai upaya dalam menunjukkan identitas nasional untuk mencapai tujuan politik suatu negara (Jora, 2013), (3) *Small States Diplomacy*, merupakan diplomasi yang dijalankan oleh negara-negara dengan ukuran wilayah yang cenderung kecil dan memiliki pengaruh yang tidak besar dalam perpolitikan internasional atau organisasi internasional (Cooper & Shaw, 2009).

²⁶ Cooper, A. F., & Shaw, T. M. “*The Diplomacies of Small States at the Start of the Twenty-first Century: How Vulnerable? How Resilient? The Diplomacies of Small States*”. 2009. Hlm. 1.

²⁷ Thorhallson & Bailes. *Small States Diplomacy*. Chapter 24. (California : SAGE Publications Inc., 2016). Hlm. 297-298.

lebih rendah atau sama dengan \$3.000 juta²⁸. *Small states* secara PDB umumnya memiliki kontribusi ekspor dagang yang relatif sedikit di tingkat global, menurut Davenport (2001) sekitar 0,03 % dan menurut Matto & Subramanian (2004) sekitar 0,05 % untuk impor dagang²⁹. Namun ukuran wilayah negara menjadi acuan yang paling umum dan utama dalam mengategorikan suatu negara ke dalam *small states*; dikarenakan cukup memungkinkan bagi negara kecil untuk memiliki populasi, PDB, dan alokasi anggaran militer yang besar, begitu juga sebaliknya³⁰.

Berbeda dari negara-negara yang memiliki wilayah luas dan kekuatan yang dominan dalam perpolitikan internasional, *small states* cenderung kurang mencolok dan tidak mendapatkan *privilege* dalam organisasi internasional. Menurut William E. Peterson, *small states* tidak memiliki kemampuan untuk mengandalkan *pure power* dalam politik internasional, sehingga poin vitalnya adalah bagaimana mereka dapat bertahan dalam tekanan dan memiliki kapabilitas untuk memenuhi target kebijakan yang dibuatnya sendiri³¹. Tidak dipungkiri negara-negara *small states* adalah negara yang tidak diuntungkan dari segi wilayah dan juga pengaruh internasional, negara seperti ini akan cenderung mengikuti arus politik global negara-negara *powerful states* seperti Tiongkok, Amerika Serikat, atau Rusia, jika konflik internasional mulai memanas dan berpotensi terdapat konflik terbuka.

²⁸ Brito, Joao A. "Munich Personal RePEc Archive Defining Country Size: A Descriptive Analysis of Small and Large States". MPRA Paper No. 66149. 2015. Hlm. 1-28.

²⁹ *Ibid.* Hlm 3.

³⁰ Thorhallsson, Baldur. "Studying Small States: A Review". Small States & Territories. Vol. 1. No. 1. 2018. Hlm. 18.

³¹ Paterson, W. E. "Small States in International Politics". Cooperation and Conflict. Vol. 4. No. 1. 1969. Hlm. 119-123.

Taiwan yang merupakan *small states* dengan luas wilayah 36.197 km²^[32] bukan berarti tidak dapat memiliki peran lebih di politik internasional atau setidaknya dapat bertahan dalam kerentanan yang dimiliki; mereka dapat memengaruhi diplomasi internasional melalui kapabilitas negara, tidak hanya berfokus pada hal seputar, sumber daya manusia, tanah, sumber energi, atau uang, melainkan posisi geostrategis³³. Kedua adalah budaya politik dan rancangan institusi, tentu dengan melihat budaya, suku, agama, atau adat istiadat; rancangan institusi dapat berupa lembaga pemerintahan domestik atau internasional³⁴. Ketiga adalah strategi politik, *small states* harus cerdas dalam memanfaatkan potensinya yang terbatas dan memaksimalkan perannya dalam lingkup internasional³⁵. Hal tersebut juga selaras dengan yang disampaikan oleh Thorhallson & Bailes mengenai proses berjalannya *small states diplomacy*; beberapa hal penting bagi negara-negara kecil dalam menjalankan diplomasi tersebut adalah pengaturan internal negara tersebut yang meliputi, budaya politik dan tindakan yang menggambarkan kapabilitas negara, melalui kebijakan eksternal³⁶.

1.4.1.2 Diplomatic Recognition

Kedaulatan suatu negara tentu tidak mudah untuk dicapai, setidaknya dalam dunia internasional konteks kedaulatan dapat dibedakan menjadi dua jenis;

³² Taiwan Government. "About Taiwan". Diakses dari <https://www.taiwan.gov.tw/about.php>. Pada tanggal 18 Maret 2021.

³³ Bueger & Wivel. "How do small island states maximize influence? Creole diplomacy and the smart state foreign policy of the Seychelles". *Journal of Indian Ocean Region*. 2018. Hlm. 8.

³⁴ *Ibid.* Hlm. 12-13.

³⁵ *Ibid.* Hlm. 13-14.

³⁶ Thorhallson & Bailes. *Op. Cit.* Hlm. 298.

kedaulatan internal dan kedaulatan eksternal³⁷. Kedaulatan internal umumnya yang melingkupi pemerintahan, wilayah, penduduk, yang singkatnya merupakan lingkup *de facto* dari sebuah negara³⁸. Kemudian yang menjadi tantangan dalam lingkup internasional adalah pengakuan dari negara lain, yang bertujuan untuk memberikan legitimasi bahwa negara tersebut keberadaannya diakui secara internasional dan dapat melakukan hubungan diplomatik dengan negara lain³⁹. Hal tersebut menjadi tuntutan tersendiri bagi setiap berdirinya negara, agar negara tersebut terlihat berada pada tingkatan yang sama dalam hubungan bilateral dan multilateral, yang pada umumnya setiap negara dalam lingkup internasional mengejar status tertentu agar dianggap setara⁴⁰.

Maka dapat disimpulkan melalui beberapa penjelasan sebelumnya bahwa *diplomatic recognition* merupakan upaya suatu negara untuk mencapai pengakuan di lingkup internasional melalui upaya-upaya atau pendekatan diplomatis. Kesimpulan tersebut juga di perkuat dengan pendapat Newnham dalam jurnal *Embassies for Sale: The Purchase of Diplomatic Recognition by West Germany, Taiwan and South Korea*, yang menyatakan bahwa pengakuan dari negara lain atas kedaulatan suatu negara menjadi poin vital agar dapat menjalankan kepentingan mereka dalam perpolitikan internasional⁴¹. Dalam perjalanannya, *diplomatic recognition* sering bertumpu pada perekonomian domestik dan

³⁷ Rich, T. S. "Status for Sale : Taiwan and the Competition for Diplomatic Recognition". *Issues & Studies* 45. No. 4. 2009. Hlm. 159-188.

³⁸ *Ibid.* Hlm. 162.

³⁹ *Ibid.* Hlm. 163.

⁴⁰ Shattuck, T. J. "The Race to Zero?: China's Poaching of Taiwan's Diplomatic Allies". *Foreign Policy Research Institute by Elsevier Ltd, ORBIS 1049*. Vol. 64. No. 2. 2020. Hlm. 335.

⁴¹ Newnham, R. E. "Embassies for Sale: The Purchase of Diplomatic Recognition by West Germany, Taiwan and South Korea". *International Politics*. Vol. 37. No. 3. 2000. Hlm. 260.

pengaruhnya terhadap perdagangan internasional (ekspor & impor)⁴². Sektor ekonomi memang merupakan sektor yang dapat diandalkan untuk menjalin hubungan non-diplomatis dikarenakan tidak perlu untuk menjalin hubungan diplomatik antara kedua negara; di sisi lain ekonomi dapat bergerak lebih fleksibel dengan melihat pergerakan pasar (*supply & demand*) dibandingkan hubungan diplomatik yang lebih politis bagi negara yang terlibat.

Hubungan diplomatik bagi negara dinilai sangat penting bagi keberlangsungan negara, yang di antaranya akan berpengaruh pada; pengakuan kedaulatan eksternal, peran atau keterlibatan negara dalam organisasi internasional, legitimasi untuk menganggap diri mereka sebagai negara yang berdaulat, dan untuk meminimalisir ancaman dari negara lain⁴³. Dalam mengupayakan kedaulatan eksternal, negara dapat melakukan pemberian *aid packages* kepada negara lain untuk mengakui keberadaan mereka; seperti Taiwan kepada Guatemala⁴⁴. Keterlibatan dalam organisasi internasional dapat lebih dioptimalkan demi kepentingan nasional di kancah global. Kemudian untuk legitimasi suatu negara tidak hanya mengandalkan pengakuan dari negara lain, secara tidak langsung pengakuan dari negara-negara *superpower* juga berpengaruh bagi *status quo*, terbukti dari pengakuan yang dimiliki oleh Taiwan sekarang masih belum cukup untuk menyatakan negara mereka berdaulat⁴⁵.

Adanya *diplomatic recognition* terkadang tidak lepas dari kondisi manuver ekonomi suatu negara yang berujung pada jual beli kedaulatan atau bahkan hingga

⁴² *Ibid.*

⁴³ Shattuck, T. J. *Op. Cit.* Hlm. 342-345.

⁴⁴ *Ibid.* Hlm. 339-340.

⁴⁵ *Ibid.*

terjadi *checkbox diplomacy*⁴⁶. Dari sektor ekonomi tersebut kemudian dapat dilakukan dengan dua cara, yakni ‘membeli’ pengakuan dari negara lain melalui pemberian *aid packages* dan dibalas dengan mengakui kedaulatan negara tersebut; seperti yang dilakukan Jerman Barat. Cara kedua dapat menggunakan perekonomian melalui akselerasi perdagangan di lingkup global hingga nanti akhirnya dianggap oleh negara lain sebagai negara yang potensial untuk menjalin kerjasama; seperti yang dilakukan oleh Korea Selatan⁴⁷. Namun memang pemberian *aid packages* atau *economic aid* merupakan cara yang dianggap paling efisien, dikarenakan selama negara yang membutuhkan pengakuan memiliki kemampuan untuk memberikan *aid packages* maka pengakuan tersebut dapat cepat tercapai. Namun, dalam implementasinya terkadang terdapat kendala bagi negara yang sedang mencari kedaulatan, dikarenakan sedang berkonstelasi secara politik dengan kekuatan besar; contohnya adalah Taiwan dan Tiongkok, yang kemudian menyebabkan terjadinya *checkbox diplomacy*⁴⁸.

Secara tidak langsung konsep *diplomatic recognition* menyatakan bahwa negara masih sangat bergantung pada pengakuan-pengakuan entitas internasional dan juga negara-negara *superpower* demi mengamankan posisi politik di kancah global. Menurut Neumayer (2008) dalam jurnal Brandon J. Kinne yang berjudul *Dependent Diplomacy: Signaling, Strategy, and Prestige in the Diplomatic Network*, bahwa setiap negara memiliki keterbatasan sumber daya dan harus

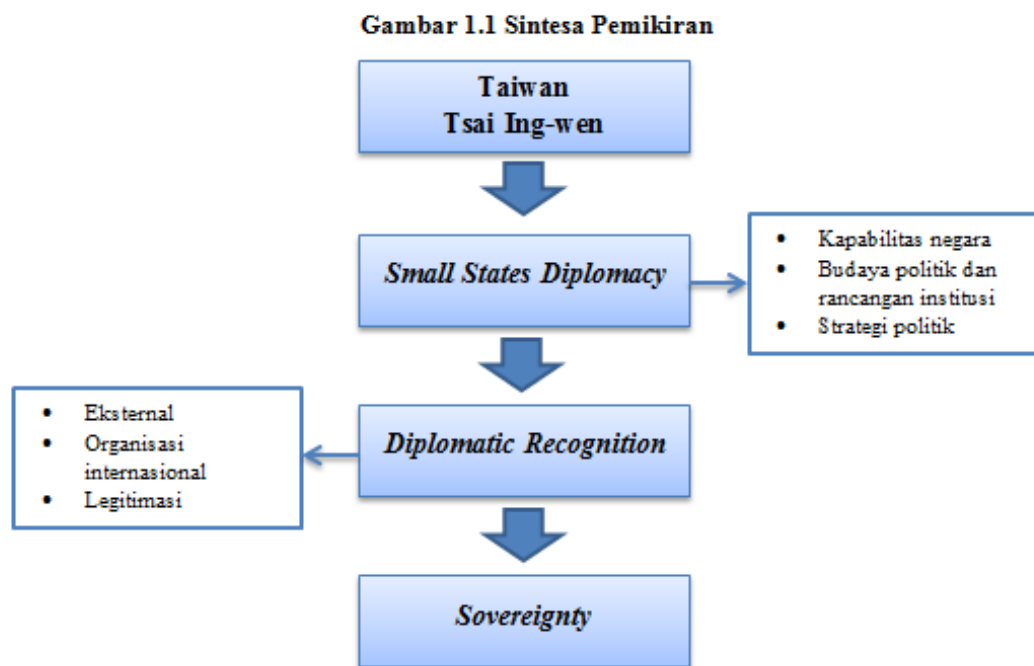
⁴⁶ Rich, T. S. *Op. Cit.* Hlm. 172-173. “*Checkbox Diplomacy* adalah upaya dua negara atau lebih yang bersaing untuk ‘membeli’ pengakuan dari negara lain atas kedaulatannya atau menarik pengakuan atas kedaulatan negara lain (umumnya melalui pemberian *aid packages*).”

⁴⁷ Newnham, R. E. *Op. Cit.* Hlm. 261-268.

⁴⁸ Rich, T. S. *Op. Cit.* Hlm. 171-176.

selektif dalam memilih rekan diplomatik⁴⁹. Ajang internasional menjadi tempat ber-*gengsi* bagi banyak negara sehingga antara satu sama lain saling memberikan sinyal akan ketertarikan untuk menjalin hubungan diplomatik⁵⁰. Sehingga pengakuan dibutuhkan agar posisi negara di dunia internasional bersifat simetris dan dapat dengan mudah membangun hubungan interdependensi yang berkelanjutan.

1.5 Sintesa Pemikiran



Skema tersebut merupakan gambaran besar bagaimana alur dan kerangka berpikir yang nantinya akan digunakan oleh peneliti dalam menjelaskan keseluruhan isi di penelitian ini. *Small states diplomacy* digunakan untuk menganalisis apa saja kapabilitas yang dimiliki oleh Taiwan, kemudian budaya

⁴⁹ Kinne, Brandon J. "Dependent Diplomacy: Signaling, Strategy, and Prestige in the Diplomatic Network". *International Studies Quarterly*. Vol 58. No. 2. 2014. Hlm. 247.

⁵⁰ *Ibid.* Hlm. 248.

politik dan rancangan institusi dengan meninjau politik domestik Taiwan, dan strategi Taiwan di lingkup global. *Diplomatic recognition* berfungsi sebagai upaya Taiwan dalam menjalankan diplomasinya ke lingkup global yang ditunjang melalui konsep *small states diplomacy* sebelumnya. Sehingga beberapa target yang diperlukan demi mempertahankan kedaulatan adalah kedaulatan eksternal, keterlibatan dalam organisasi internasional, dan legitimasi di lingkup global.

1.6 Argumen Utama

Berdasarkan kerangka berpikir dan sintesa pemikiran, bahwa Taiwan masih membutuhkan upaya lebih untuk membuktikan kedaulatannya di lingkup internasional dari bayang-bayang *One-China Principle*. Kedaulatan Taiwan berusaha dipertahankan dengan *small states diplomacy* yang akan menjadi tiga turunan spesifik. Pertama adalah dengan memanfaatkan kapabilitas negara terutama dalam hal ekonomi dan perdagangan. Kedua adalah dengan budaya politik dan rancangan institusi dengan menggambarkan politik domestik dan bagaimana jalannya birokrasi tersebut. Ketiga adalah strategi politik dalam ‘*seeking attention*’ di lingkup internasional dengan memperbanyak hubungan kerjasama non-diplomatik serta memanfaatkan kapabilitas negara yakni dengan penerimaan FDI, pemberian ODI, *new southbound policy*, dan kerjasama ekonomi lainnya. Upaya-upaya tersebut dilakukan agar komponen dalam *diplomatic recognition* dapat tercapai.

Penggunaan konsep *diplomatic recognition* diwujudkan melalui beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh Taiwan dalam masa pemerintahan Tsai Ing-wen; seperti pemberian *aid packages* bagi beberapa negara yang masih mengakui

kedaulatan Taiwan hingga saat ini, menjaga hubungan baik dengan negara lain melalui hubungan dagang, dan beberapa kerjasama non-diplomatik. Keaktifan Taiwan dalam organisasi internasional seperti APEC (*Asia-Pacific Economic Cooperation*) dan WTO (*World Trade Organization*) dapat menjadi media bagi Taiwan agar tetap dipertimbangkan setidaknya dalam konteks perekonomian di kancah global. Kerjasama secara non-diplomatik dengan negara *superpower* seperti Amerika Serikat juga dapat mengamankan posisi Taiwan dari konflik yang berpotensi semakin membesar dengan Tiongkok, setidaknya posisi Taiwan tetap dipertimbangkan oleh negara-negara besar meskipun sebagai rekan dagang.

1.7 Metodologi Penelitian

1.7.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang peneliti ambil dalam penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif berusaha untuk menjelaskan secara lebih detail dan terstruktur dalam permasalahan atau peristiwa yang terjadi dengan melibatkan subjek baik individu atau kelompok. Dengan demikian peneliti nantinya akan berusaha menjelaskan secara lebih jauh dan komprehensif untuk melihat bagaimana upaya Taiwan dalam menjaga kedaulatan pada pemerintahan Tsai Ing-wen. Menurut Lamont penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang secara umum merujuk pada pengumpulan data yang bergantung pada data non-kuantitatif atau penelitian yang menghasilkan temuan yang tidak dapat didapatkan dengan menggunakan prosedur-prosedur

numerik⁵¹. Kemudian untuk penelitian deskriptif menurut Gall M, Gall J, & Borg, digunakan untuk menjelaskan fenomena dan karakteristiknya serta umumnya menggunakan observasi atau survei untuk mengumpulkan data⁵². Sehingga nantinya penelitian tersebut akan berusaha menjelaskan fenomena dan karakteristik dari upaya Taiwan dengan pendekatan kualitatif tanpa menggunakan tolak ukur kuantitatif.

1.7.2 Jangkauan Penelitian

Agar penelitian yang nantinya dibahas tidak terlalu lebar dan jauh dari substansi pembahasan, maka peneliti memberikan batasan waktu. Jangkauan pada penelitian ini mengambil rentang waktu tahun 2016-2020. Pada rentang waktu tersebut merupakan tahun dari kepemimpinan presiden Tsai Ing-wen periode pertama dan kedua awal. Pada rentang waktu tersebut peneliti menganggap bahwa perlu diteliti terutama mengenai kerjasama-kerjasama non-diplomatik yang dijalankan oleh Tsai Ing-wen sebagai upaya dalam menjaga kedaulatan kedaulatan Taiwan dari Tiongkok (*mainland*) serta bagaimana melihat upaya tersebut sebagai implementasi *small states diplomacy*.

1.7.3 Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan penjelasan pada poin tipe penelitian, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data kualitatif dengan yang umumnya dibagi menjadi dua; primer dan sekunder. Data yang dikumpulkan secara primer berasal dari adanya

⁵¹ Lamont, K. C. *Research Methods in International Relations*. (London: Sage Publication Ltd, 2015).

⁵² Nassaji, H. “*Qualitative and descriptive research: Data type versus data analysis*”. *Language Teaching Research*. Vol. 19. No. 2. 2015. Hlm. 129–132.

partisipasi individu dalam menyampaikan opini atau perspektif melalui media seperti wawancara, survei, dan observasi langsung⁵³. Namun, peneliti akan mengumpulkan data secara sekunder yang artinya peneliti tidak akan langsung terjun ke lapangan, observasi atau wawancara secara langsung. Sehingga peneliti nantinya akan memanfaatkan kajian literatur seperti buku dan jurnal serta pemanfaatan *website* pemerintah atau institusi terkait dan kanal berita seperti CNN, BBC, dan sejenisnya.

1.7.4 Teknik Analisis Data

Analisis data pada umumnya dibagi menjadi dua, yakni kualitatif dan kuantitatif. Maka untuk melakukan pendekatan terhadap data yang nantinya kemudian diolah agar mendapatkan hasil atau kesimpulan maka akan bergantung pada dua pendekatan tersebut. Untuk analisis data kuantitatif akan menggunakan frekuensi, persentase, rata-rata, atau menggunakan komponen numerik dan statistik yang lain. Lalu untuk analisis data kualitatif dapat memanfaatkan hasil observasi, wawancara, atau analisis isi dan wacana judul pada berita yang terbatas untuk dapat diukur melalui metode kuantitatif. Di sisi lain terdapat juga teknik analisis campuran yakni dengan mengumpulkan data secara kualitatif yang kemudian dikelola secara kuantitatif⁵⁴. Maka selaras dengan tipe penelitian dan teknik pengumpulan data, peneliti akan menggunakan teknik analisis kualitatif.

⁵³ *Ibid.* Hlm. 129.

⁵⁴ *Ibid.* Hlm. 129.

1.7.5 Sistematika Penulisan

Demi memudahkan pembaca dan praktisi dalam memahami penelitian yang disusun oleh peneliti nantinya, maka peneliti akan menguraikan garis besar dan pemahaman yang sistematis yang kemudian dibagi dalam beberapa bab besar sebagai berikut,

BAB I merupakan pendahuluan yang menjelaskan garis besar permasalahan melalui latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, landasan teori dan konseptual, sintesa pemikiran, argumen utama, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II menjelaskan mengenai sejarah dan dinamika kepemimpinan Taiwan di *mainland*, sengketa antara PRC (Tiongkok) dan ROC (Taiwan), hingga keterlibatan Amerika Serikat pada saat konflik sengketa tersebut terjadi.

BAB III menjelaskan mengenai upaya yang dilakukan oleh Taiwan pada masa pemerintahan Tsai Ing-wen dalam mempertahankan kedaulatan melalui penerapan konsep *small states diplomacy* dan *diplomatic recognition* sebagai alat untuk '*seeking attention*' di konteks global.

BAB IV kesimpulan dan saran yang merupakan hasil dari analisis mulai dari BAB I hingga BAB III.